

Prof. Dr. Muhadam Labolo



Butir Pemikiran (2)

Negara, Demokrasi, Birokrasi, Etika dan Keadilan Sosial



Butir Pemikiran (2)

Negara, Demokrasi, Birokrasi, Etika dan Keadilan Sosial

Negara adalah cermin dari kebersamaan dan kebebasan (Hegel, 2019). Dua hal yang tak mungkin dipenuhi oleh institusi keluarga dan civil society. Keluarga hanya mungkin memenuhi kebersamaan dengan membatasi kebebasan. Sementara civil society memberikan kebebasan dengan membatasi kebersamaan. Negara hadir membatasi kelemahan keduanya guna meraih tujuan kolektif, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan.

Demokrasi adalah ide tentang kebebasan dan partisipasi. Kebebasan dan partisipasi dibatasi sesuai nilai-nilai dan konsensus yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam praktek, demokrasi bukanlah metode sederhana yang dapat digunakan hanya dengan mengatasnamakan rakyat. Demokrasi butuh persyaratan mendasar, setidaknya soal keterdidikan dan keamanan rakyatnya. Tanpa itu, demokrasi mudah dibajak, disabotase, serta dipermalukan oleh lawan-lawan politiknya, teokrasi dan monarki.

Birokrasi dipercaya sebagai mesin paling efisien dan efektif dalam meraih tujuan politik pemerintahan. Dalam peran itu birokrasi dituntut netral dan adil kendatipun la sehari-hari bekerja untuk negara. Oleh sebab salah satu fungsi negara memberi keadilan bagi semua warga, maka tindakan birokrasi dituntut mampu merepresentasikan fungsi negara dalam hal kenetralan dan keadilan. Untuk maksud itulah birokrasi ada, melayani secara profesional menurut tugas dan fungsinya masing-masing.

Etika hendaknya melandasi semua aktivitas bernegara. Entah cara berdemokrasi maupun penggunaan mesin birokrasi. Menyadari hukum tak mampu menjangkau sendi-sendi kehidupan warga, la hanya mungkin dengan cara membangun kesadaran intrinsik agar tata laku pribadi, warga, profesi, organisasi, sosial, dan pemerintahan terkendali dengan sendirinya. Tanpa etika, negara akan disibukkan oleh pelanggaran moral untuk menentukan baik-buruk.

Untuk semua tema-tema di atas, penting dihadirkan guna mengatasi problem sosial. Negara bertugas menciptakan keadilan sosial. Demokrasi dipilih lewat mekanismenya yang paling efektif guna membuahkan pemimpin yang memahami betul kebutuhan rakyat. Birokrasi diharap netral agar tujuan negara dapat realisasikan lewat pelayanan yang baik. Di atas semua itu etika dihadirkan untuk memandu negara, demokrasi, dan birokrasi mencapai tujuan konstitusional.

Buku kecil ini, adalah lanjutan dari butir-butir pemikiran pertama tentang Negara, Demokrasi dan Religi. Berisi isu-isu besar dengan respon pendek. Isu besar yang oleh negara tak pernah bisa diselesaikan. Di respon pendek mengingat keterbatasan waktu di tengah tantangan isu lain yang terus melimpah. Tentu saja, tulisan ini hanya dimaknai sebagai kepedulian terhadap ragam masalah yang dihadapi pemerintah sebagai satu-satunya personifikasi paling konkrit dari negara. Buku ini tentu sehat dibaca bagi pembelajar dan pemerhati pemerintahan.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-516-006-1



BUTIR PEMIKIRAN (2)
NEGARA, DEMOKRASI, BIROKRASI,
ETIKA DAN KEADILAN SOSIAL

Prof. Dr. Muhadam Labolo



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

BUTIR PEMIKIRAN (2)
NEGARA, DEMOKRASI, BIROKRASI, ETIKA DAN
Keadilan Sosial

Penulis : Prof. Dr. Muhadam Labolo

Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-516-006-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**
JULI 2024
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Butir Pemikiran (2); Negara, Demokrasi, Birokrasi, Etika dan Keadilan Sosial” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari 5 topik, yaitu topik pertama mengenai negara, hukum dan keadilan, topik kedua mengenai demokrasi dan mekanisme pemilu, topik ketiga mengenai birokrasi dan kepemimpinan pemerintahan, topik keempat mengenai etika pemerintahan, dan topik kelima mengenai problem sosial dan dinamika pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini

kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN.....	1
Tujuan Negara, Bahagia atau Sejahtera?	2
Mengontrol Keadilan Negara	9
Eksistensi Kebenaran Alternatif	14
Relasi Hukum Pemerintahan.....	19
<i>Amicus Curiae</i> & Keadilan Hakim.....	24
Pergeseran <i>Term</i> Kejahatan	28
Urgensi Polisi & Pemerintah.....	34
Urgensi Polisi dan Tentara	38
Tanggungjawab Keamanan Negara	45
Menjaga Kehormatan.....	49
DEMOKRASI DAN MEKANISME PEMILU	53
Mengejar Substansi Demokrasi	54
Problem Mekanisme Demokrasi	60
Peran Utama Elemen Pemilu	65
Dialektika Debat Calon Presiden	70
Partai & Mekanisme Pemilu	74
Petugas Partai & Petugas Rakyat	78
Mencari Kesamaan Dalam Realitas Politik	82

Kritik Politik Kaum Manula	86
Mekanisme Pemilu Legislatif	91
Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah	95
Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah	101
Representasi Dewan, Mandul?	108
Ekses Konflik Internal Partai Politik	114
Menanti Akhir Perselisihan Pemilu	118
Mereparasi Mekanisme Pemilu	123
Masa Depan Demokrasi	128

BIROKRASI DAN KEPEMIMPINAN

PEMERINTAHAN	135
Tanggungjawab <i>Civil Servant</i>	136
Ketidaknetralan Birokrasi	140
Hak Politik ASN, Perlukah Dilucuti?	146
Resiprokal Jabatan Dalam UU ASN	152
Tertib Sipil & Militer, Pelajaran Basarnas	157
Spesialisasi Pamongpraja	163
Mereposisi Entitas Provinsi	170
Mereposisi Status Gubernur	175
Abstraksi dan Teknikalitas Pemimpin	179
Digitalisasi Pemerintahan Daerah	182
Transformasi Tata Kelola & Manajemen Pemda	186

Menyiapkan Kepemimpinan Pemerintahan	190
ETIKA PEMERINTAHAN	195
Etikabilitas & Sumpah Pemuda.....	196
Hak Kaya & Etika Publik.....	200
Prahara Politik Dinasti.....	204
Pejabat dan Penjahat	208
Mencegah Pembusukan Kepala	213
Membatasi Libido Kuasa Kepala Desa.....	216
Mengendalikan Kuasa	222
Motivasi & Kualitas Pendidikan	226
<i>Integrity, Intelegencia, dan Energy</i>	230
Kebahagiaan dalam Relasi Pemerintahan.....	234
PROBLEM SOSIAL DAN DINAMIKA	
PEMERINTAHAN	237
Kerawanan <i>Money Politics</i>	238
<i>Dirty Vote</i> Sebagai <i>Warning</i>	243
Rempang dan Peran <i>Governmentality</i>	248
Memastikan Pangan dan Energi Kita	254
Berpacu Mencegah <i>Stunting</i>	258
Mengendalikan Nafsu Pemekaran.....	263
Membaca Suara Akademisi.....	267
Hilangnya Peran <i>Middle Class</i> ?	271
Tantangan Elite	276

Koruptologi.....	280
Optimisme Subkultur Sosial	285



BUTIR PEMIKIRAN (2)
NEGARA, DEMOKRASI, ETIKA DAN
KEADILAN SOSIAL

Prof. Dr. Muhadam Labolo





**NEGARA, HUKUM DAN
KEADILAN**



Tujuan Negara, Bahagia atau Sejahtera?



Tujuan negara bahagia adalah konsep klasik dalam dialektika akademik. Setidaknya dari tinjauan spiritual dan filsafat. Konsep bahagia telah tumbuh lewat perkembangan agama-agama di dunia. Semua kitab suci seperti Zabur (10 SM), Taurat (12 SM), Injil (1 M), dan Quran (17 M) meletakkan tujuan manusia pada kebahagiaan hidup yang hakiki. Bahagia dalam pandangan spiritual tak hanya melulu soal kenikmatan di dunia, juga kebahagiaan di akherat. Disitu masalahnya, abstrak dan privat.

Dari aspek filsafat politik misalnya, setiap manusia pada hakekatnya menginginkan kebahagiaan (Aristoteles,1887). Sebaliknya, semua hal yang merusak dan menciptakan penderitaan penting untuk dihindari. Gagasan itu melahirkan cara pandang *hedonisme* yang oleh Aristoteles di kritik dengan segala kelemahannya. Manusia boleh saja menikmati kebahagiaan, namun tak harus lupa diri.

Mengontrol Keadilan Negara



Pengadilan Sambo berakhir dengan putusan maksimal, hukuman mati (Selasa, 13 Februari 2023). Hakim berusaha memuaskan dahaga publik atas keraguan akhir peradilan panjang pembunuhan Joshua Hutabarat. Keluarga korban, pengacara, jaksa, pengamat hukum, dan sebagian besar masyarakat memperlihatkan apresiasi lewat ekspresi di media sosial. Komentar itu seakan memberi pesan positif pada negara dan perangkat hukumnya. Tapi apakah keadilan tercapai?

Tujuan hukum pada dasarnya mencapai keadilan. Keadilan bermakna subjektif, semacam kepuasan atas penyamaan rasa, penghormatan atas hak-hak orang lain, atau memperlakukan seseorang sesuai hak dan kewajibannya. Almarhum dosen saya, Bernardus Luankali suka mengutip keadilan menurut filosof Aristoteles, terhadap hal yang sama diperlakukan sama, dan terhadap hal beda diperlakukan secara berbeda.



**DEMOKRASI DAN
MEKANISME PEMILU**



Mengejar Substansi Demokrasi



Barangkali patut kita renungkan, sejauh manakah substansi demokrasi dicapai dalam realitas bernegara pasca reformasi. Pertanyaan ini rasanya penting baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Bila tujuan demokrasi itu pada akhirnya adalah kesejahteraan, apakah kita sebagai warga menikmatinya? Dalam nilai kualitatifnya misalnya, apakah kita benar-benar merasakan satu nilai penting seperti *accountability* kata PM Malaysia, Dato' Anwar Ibrahim (2022).

Dalam nilai kuantitatifnya, apakah realitas masyarakat menikmati sandang, pangan dan papan sekurang-kurangnya pada taraf minimal. Mungkinkah kesejahteraan bisa diperoleh lewat perangkat lain semacam sistem otoriter dan totaliter? Dengan melihat pengalaman dan fakta diberbagai negara, jawabannya relatif. Meski ada, faktanya lebih 80% negara di dunia menggunakan perangkat demokrasi sebagai cara bernegara untuk mencapai kesejahteraan (Deni, 2022).

Problem Mekanisme Demokrasi



Demokrasi menyediakan sirkulasi kekuasaan secara terjadwal. Sirkulasi di desain sedemikian rupa agar tak hanya representatif, juga akomodatif lewat sejumlah prasyarat yang disepakati. Dengan begitu setiap kandidat punya waktu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dalam sistem otoriter dan *monarchi* margin kekuasaan bergantung pada siapa aktor terkuat. Kekuasaan dapat diakhiri dan diperpanjang tanpa persetujuan pemegang daulat.

Kata Ibnu Taimiyah (1328), penguasa memiliki hak memerintah sampai penguasa lain yang lebih kuat merenggutnya. Agar renggutan kuasa tak menimbulkan petaka dibutuhkan mekanisme yang beradab. Petaka itu tak hanya resiko perjumpaan antar basis pendukung, juga produk dari sirkulasi itu sendiri. Tentu saja tak ada pemimpin terpilih yang sempurna, namun tak ada salahnya bila mekanisme memperlihatkan kelebihan dan kekurangan para kandidat.



**BIROKRASI DAN
KEPEMIMPINAN
PEMERINTAHAN**



Tanggungjawab *Civil Servant*



Gouldner dalam Thompson (1967) melihat administrasi dalam dua perspektif utama, yaitu sistem alamiah dan rasionalitas. Alamiah, karena administrasi tumbuh dalam realitas sosial dimana-mana. Rasional, sebab administrasi adalah upaya sadar mencapai tujuan tertentu. Administrasi dalam linguistik latin menunjuk kata *ad-ministrare*, bermakna *to serve*, melayani.

Kata *ministrare* berkaitan dengan *minister*. Akar kata *minister* mengandung serabut *minis*, artinya *less*, kurang. Maknanya, orang yang melayani (*servant*) memiliki posisi lebih rendah di banding mereka yang dilayani. Jadi konsep administrasi sebetulnya menunjukkan relasi yang melayani dan yang dilayani tak setaraf. Ketidakseimbangan itu menimbulkan disharmoni *civil servant* dalam pelayanan.

Dalam relasi spiritual, konsep *ministry* adalah Tuhan yang dilayani (zat tertinggi). Dengan demikian pelayanan bukanlah proses *exchange* yang didasarkan oleh rasionalitas semata, melainkan supra-rasional

Ketidaknetralan Birokrasi



Birokrasi di klaim tak netral. Tak netralnya sulit diidentifikasi, kecuali pada moment keramaian politik di setiap transisi kekuasaan. Setidaknya demikian judul buku provokatif terbitan Kompas Gramedia, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia, Studi Zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi* (2014). Penulisnya seorang birokrat JPT Madya yang kebetulan menjabat Gubernur Gorontalo, Hamka A Hendra Noer.

Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif buku itu menggambarkan bagaimana birokrasi Indonesia dengan gamblang dipolitisasi. Politisasi tak hanya di pusaran kekuasaan, demikian pula di level *local government*. Bedanya, relasi di daerah lebih emosional, didominasi oleh *local strongman*, partai politik dan organisasi masyarakat.

Sejujurnya, buku ini justru memperlihatkan bagaimana kuatnya intervensi partai politik pada birokrasi. Birokrasi terdistorsi lewat campur tangan partai politik yang terlalu jauh. Efeknya wajah birokrasi



ETIKA PEMERINTAHAN



Etikabilitas & Sumpah Pemuda



Kemunduran Perdana Menteri Inggris Luis Truzz dan Menteri Dalam Negerinya Suella Braverman patut direnungkan di tengah miskinnya etikabilitas di negeri yang mendasarkan diri pada *groundslagh* Pancasila. Selain sebagai pondasi bernegara, Pancasila pun sarat nilai etik lewat butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu dulu, entah sekarang.

Truzz berkuasa hanya 45 hari. Waktu terpendek dalam sejarah pemerintahan parlementer pasca menggantikan seniornya Boris Johnson. Truzz mundur oleh sebab tingginya tekanan internal dan eksternal yang mempengaruhi stabilitas ekonomi Inggris. Dua hari sebelum itu, Braverman mundur dengan alasan salah mengirim email. Ia menggunakan email pribadi untuk mengirim info negara pada rekan kerjanya. Praktis, Braverman hanya berkantor selama 43 hari.

Negara-negara di Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon menggunakan etika dan hukum sebagai upaya menertibkan perilaku masyarakat. Etika sebagai

Hak Kaya & Etika Publik



Setiap kita pada umumnya memilih kaya dibanding miskin. Imaji kaya dideskripsikan sebagai seseorang yang memiliki harta banyak dalam bentuk properti, investasi maupun sumber daya bernilai. Kaya diasosiasikan pula kemampuan seseorang melakukan segala hal tanpa batas karena dukungan finansial. Kekayaan berhubungan dengan status sosial, kekuasaan, dan prestise dalam struktur sosial.

Sebaliknya, kaya melawan realitas miskin. Miskin digambarkan minus sumber daya ekonomi. Kaum papa adalah mereka yang tuna akses pada kebutuhan dasar. Ragam kemiskinan paling ekstrem dipengaruhi aspek struktural dan kultural. Hal pertama berada di pundak pemerintah, sisanya merupakan mentalitas masyarakat yang membutuhkan intervensi kolektif (Nurhazanah, 2023).

Perspektif kaya dan miskin memiliki banyak muka. Dalam wajah religi, kaya dan miskin bergantung pada kesholehan penganutnya. Kaya misalnya, dinilai



**PROBLEM SOSIAL DAN
DINAMIKA
PEMERINTAHAN**



Kerawanan *Money Politics*



Salah satu isu besar dalam pemilu 2024 adalah politik uang. Menurut Bawaslu (2023), lima propinsi paling rawan politik uang yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Utara. Menariknya, salah satu dari 20 daerah rawan politik uang adalah Kabupaten Banggai. Satu kabupaten di Sulawesi Tengah dengan tingkat pendapatan signifikan sejak masuknya investasi asing selain Kabupaten Morowali.

Posisi Kabupaten Banggai ranking dua setelah Jayawijaya. Jayawijaya satu diantara tiga kabupaten termiskin di Provinsi Papua Pegunungan dalam lima tahun terakhir (BPS, 2022). Kontras dengan itu, Banggai merupakan satu diantara dua wilayah di Sulteng yang angka kemiskinannya dibawah 10% selain Kota Palu (BPS, 2022). Artinya, Banggai bukan daerah termiskin sekalipun pernah mencapai inflasi tertinggi di 2022.

Terlepas dari persoalan metodologi yang digunakan Bawaslu, tentu ini *alarm* positif untuk

Dirty Vote Sebagai Warning



Dirty Vote, di anggap film dokumenter berjenis perjalanan. Perjalanan pemilu yang penuh liku, laku dan luka. Proses pemilu 2024 yang penuh liku itu mampu dilewati dengan melakukan berbagai laku hingga menuai luka dimana-mana. Luka itulah yang kini dipersoalkan sebagai satu hal yang dinilai cacat hukum dan etik dalam kerangka prosedur demokrasi.

Dirty Vote, mungkin tak sepenuhnya bisa dikatakan film dokumenter. Ia peristiwa politik yang dirapikan para akademisi. Robert Flaherty pertama kali membuat film dokumenter tahun 1926 tentang cerita non-fiksi. Genre dokumenter biasanya sejarah, biografi, dan perjalanan peristiwa. *Dirty Vote* mengangkat topik perjalanan proses politik Indonesia menuju pemilu 2024.

Proses itu memperlihatkan bagaimana tahapan pemilu di desain sedemikian rupa hingga paslon tertentu tiba di titik kompetisi sebagai capres-cawapres. Narasi menampilkan bagaimana prosedur demokrasi di

Optimisme Subkultur Sosial



Gerakan-gerakan sosial sebagai satu kekuatan dalam masyarakat demokrasi kini dirangsang tumbuh. Sebabnya mungkin tak hanya karena tercipta kelesuan politik yang mengakibatkan pemerintah miskin asupan input, juga di dorong oleh medan magnet pertarungan politik yang jaraknya semakin pendek.

Kelangkaan input dalam sistem politik tak hanya mengancam berhentinya proses politik, juga penanda menguatnya gejala apatisisme akut. Sikap politik itu sekaligus koreksi bahwa pemerintah sebagai rezim yang paling bertanggungjawab tak cukup akomodatif membawa perubahan untuk sejumlah variabel.

Realitas itu secara alami merangsang kekuatan politik menemukan inang baru guna meletakkan harapan bagi perubahan di rezim selanjutnya. Peluang itu setidaknya tersedia menjelang kompetisi politik di 2024. Namun seberapa besar keseriusan setiap kandidat atas isu yang ingin diinkubasi sangat bergantung pada komitmen dan ujian dialektika di panggung politik.